

# **Faktor Pengaruh Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Bidang Pendidikan dan Keterampilan di Desa Woloau Kecamatan Maurole Kabupaten Ende**

**Maria Cicilia Pricemarina**

Prodi Ilmu Pemerintahan, STPM Santa Ursula

Email: [princemariam@gmail.com](mailto:princemariam@gmail.com)

## **Abstrak**

Berfokus pada masalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam bidang pendidikan dan keterampilan. Penelitian ini berangkat dari fenomena kehidupan masyarakat Desa Woloau dalam proses Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Untuk menganalisis hasil temuan penelitian, peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Solichin. Untuk memperoleh data dan menganalisis data yang ada, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa ada empat (4) faktor-faktor yang mendasar yang mempengaruhi implementasi program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam bidang pendidikan dan keterampilan di Desa Woloau, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende yaitu pertama, faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi. Berdasarkan teori implementasi kebijakan, ke empat (4) faktor tersebut di atas dapat dianalisis sebagai berikut: pertama, faktor komunikasi yang merupakan faktor penting dalam sebuah organisasi karena komunikasi merupakan pertukaran pesan antara dua orang atau lebih. Proses komunikasi yang belum efektif antara ketua pokja II dan pengurus serta sesama pengurusnya sehingga jalinan komunikasi menjadi terhambat dalam melaksanakan programnya. Kedua, faktor sumberdaya yang merupakan potensi yang dimiliki berupa materi atau unsur lain. Pemahaman pengurus atau pengelola suatu program sangatlah penting dalam menentukan pelaksanaan program, karena sumber daya yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Ketiga, faktor disposisi yang merupakan karakteristik seseorang yang ditunjuk ketika berinteraksi dengan orang lain. Dalam karakteristik menuju tercapainya tujuan-tujuan yang dikehendaki, suatu kebijakan akan berhasil dengan baik dalam implementasinya apabila didukung oleh pengurus pelaksanaannya. Ke empat, faktor struktur birokrasi yang merupakan tatanan birokrasi dalam mengimplementasi program-program yang direncanakan sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

**Katakunci:** Implementasi, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Pendidikan, Keterampilan

## **Abstract**

Focuses on the problem of what factors influence the implementation of the Family Welfare Empowerment Program in the areas of education and skills. This research departs from the phenomenon of community life in Woloau Village in the process of Empowering Family Welfare. To analyze the results of research findings, researchers used the Policy Implementation Theory put forward by Solichin. To obtain data and analyze existing data, researchers used descriptive qualitative research methods with data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. The results of field research found that there were four (4) fundamental factors that influenced the implementation of the Family

Welfare Empowerment Program (PKK) in the field of education and skills in Woloau Village, Maurole District, Ende Regency, namely first, communication factors, resource factors, disposition factors and bureaucratic structure factors. Based on the theory of policy implementation, the four (4) factors mentioned above can be analyzed as follows: first, the communication factor is an important factor in an organization because communication is an exchange of messages between two or more people. The communication process was not yet effective between the chairman of the Working Group II and the administrators and fellow administrators so that communication became hampered in implementing the program. Second, the resource factor which is the potential possessed in the form of material or other elements. Understanding the board or manager of a program is very important in determining program implementation, because it is the resources that determine the success of policy implementation. Third, the disposition factor which is a characteristic of a person who is designated when interacting with other people. In terms of the characteristics towards achieving the desired goals, a policy will work well in its implementation if it is supported by the implementing committee. Fourth, the bureaucratic structure factor which is the bureaucratic order in implementing planned programs so that they are able to carry out their duties and functions properly.

**Keywords:** *Implementation, Family Welfare Empowerment, Education, Skills*

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembangunan akan berhasil dengan efektif apabila di satu pihak ada fasilitas, kemudahan-kemudahan dan sistem pelayanan yang disediakan pemerintah dan di lain pihak ada partisipasi aktif seluruh masyarakat. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya, yang akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik (Sumodiningrat .,dkk, 2016: 43).

Pembangunan masyarakat pada hakikatnya adalah proses perubahan yang disengaja dan terarah dalam kehidupan bermasyarakat. Pembangunan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Konsep peningkatan taraf hidup ini diselaraskan dengan kontribusi dan potensi yang dimiliki. Pembangunan yang mengacu kepada kekuatan masyarakat berjalan secara paralel dengan konsep pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan keluarga merupakan segala upaya bimbingan dan pembinaan kepada keluarga untuk hidup sehat sejahtera lahir dan batin. Untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, sehingga dibentuk Program Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Anonim, 2010:16).

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dengan ketentuan umum melalui pasal 1 ayat 5 yakni: Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat gerakan PKK yang merupakan gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolannya oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Adapun 10 program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang terdapat dalam buku panduan TP PKK yaitu:

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2. Gotong Royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga

6. Pendidikan dan Keterampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
9. Kelestarian Lingkungan Hidup
10. Perencanaan Sehat.

Salah satu upaya Pemerintah Desa dalam menanggulangi kemiskinan keluarga khususnya ibu-ibu rumah tangga adalah melalui program-program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dalam upaya untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan dan keterampilan melalui sosialisasi motivasi kerja, pelatihan keterampilan teknik berwirausaha, dan bantuan modal usaha sebagai stimulus pelancar aktivitas kerja keluarga pada bidang keahliannya masing-masing. Cita-cita akan kesejahteraan dan kebahagiaan ibu-ibu dalam berkeluarga dapat terwujud dengan fondasi perekonomian yang kokoh melalui kegiatan kerja yang produktif dalam bingkai program-program kerja pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (Suharto, 2005:16). Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang dibentuk pada tahun 2012 dengan struktur dan kepengurusan yang dimiliki yakni Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua pokja-pokja dengan anggota yang berjumlah 20 orang. Dalam organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Woloau secara keseluruhannya berjumlah 24 orang. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga membentuk 4 (empat) kelompok kerja (POKJA) yang terdiri dari, kelompok kerja perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan dan pangan. Berdasarkan aspek yang diamati rancangan program sudah diatur tetapi dalam pelaksanaan programnya belum dilaksanakan. Pelaksanaan bidang pendidikan dan keterampilan di dalamnya terdapat program untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu program PAUD terpadu, program melatih keberanian dan kemandirian anak melalui lomba dan program kerajinan tangan. Untuk mengetahui pelaksanaan program pendidikan dan keterampilan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada POKJA II di Desa Woloau sepenuhnya tidak membawa perubahan bagi masyarakat dalam proses pemberdayaan. Faktor yang menjadi permasalahannya adalah organisasi POKJA II tidak ikut melibatkan diri atau kurang berpartisipasi di dalam program tersebut sehingga terjadinya disfungsi dalam pelaksanaan program pendidikan dan keterampilan. Oleh karena itu tidak adanya keterampilan untuk mengasah potensi yang dimiliki oleh ibu-ibu untuk menjadi kreatif, sehingga bisa diterapkan di rumah dan juga bisa dikembangkan sebagai wadah untuk berwirausaha. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 April Tahun 2020 dengan Ibu Wilhelmina N. Petu selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Woloau beliau mengatakan bahwa pada tahun 2017 pemerintah desa selaku mitra kerja TP PKK telah menyediakan fasilitas pendukung untuk memperlancar program kerja Tim Penggerak PKK dalam bidang keterampilan seperti tiga (3) buah peralatan mesin jahit, peralatan dapur dan peralatan untuk membuat kue. Meskipun sudah tersedia berbagai fasilitas ini, namun anggota POKJA II belum memanfaatkannya secara optimal. Menurut Solichin dalam buku yang berjudul analisis kebijakan dari formulasi keimplementasi kebijakan Negara mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan (Solichin, 1997:45).

Solichin juga mengatakan, dalam implementasi khususnya yang melibatkan oleh banyak organisasi pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari tiga (3) sudut pandang yakni:

1. Pemprakarsa kebijakan atau pembuat kebijakan pusat.
2. Pejabat-pejabat pelaksana di lapangan
3. Aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintah kepada siapa program-program itu diwujudkan yakni kelompok-kelompok sasaran.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang mungkin tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan yang diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Oleh sebab itu fungsi implementasi mencakup pola penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan Negara tersebut (Sistem penyampaian atau penerusan kebijakan) yang biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sarana-sarana yang dikehendaki (Solichin, 1997:47). Berdasarkan pendapat di atas, bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group. Namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh kepada semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Dalam mengimplementasi kebijakan, hal ini dikaitkan dengan program PKK dimana program tersebut sudah diterapkan akan tetapi organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam bidang pendidikan dan keterampilan Pokja II belum mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan sungguh-sungguh sehingga berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan dalam proses pemberdayaan terhadap masyarakat Desa Woloau.

## **METODE**

Sebagai alat ukur dalam penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif Menurut sugiono (2013:60), (dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain dari pada menjadi manusia sebagai instrumen penelitian utama alasannya adalah segala sesuatu belum mempunyai bentuk masalah yang pasti. Fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu dan mendapatkan hasil yang diharapkan itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti, dan tidak jelas, hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik suatu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang lain (Sugiyono,2004:11

Untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada analisis data semua data yang dikumpulkan, dikategorikan berdasarkan tema. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan msengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan.

Jadi analisis data membantu peneliti untuk memahami permasalahan yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia yaitu dengan mengumpulkan informasi dengan cara bertanya kepada responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap dan tatap muka secara langsung.

## **PEMBAHASAN**

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program PKK Dalam Bidang Pendidikan Dan Keterampilan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para nara sumber sebagai temuan peneliti ini ada empat faktor yang paling dominan yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program PKK dalam bidang pendidikan dan keterampilan di Desa Woloau, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende.

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan proses dimana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Komunikasi juga dapat disebut sebagai proses pertukaran pesan antara

dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun melalui media. Proses berlangsungnya komunikasi pada beberapa bentuk komunikasi pada dasarnya adalah sama, yaitu segala tahapan komunikasi mulai dari menciptakan informasi sampai dengan informasi tersebut dapat dipahami oleh komunikan. Berkaitan dengan implementasi program, maka komunikasi merupakan proses pembentukan dimana keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran (dalam Subarsono, 2005: 90).

Berdasarkan hasil temuan peneliti melalui wawancara diperoleh informasi yang menunjukkan bahwa, implementasi program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam bidang pendidikan dan keterampilan di Desa Woloau belum memiliki proses komunikasi yang efektif. Proses komunikasi yang belum efektif antara ketua pokja II dan pengurusnya sehingga jalinan komunikasi menjadi terhambat dalam melaksanakan program-program pada bidang pendidikan dan keterampilan. Oleh karena itu, dalam proses komunikasi terdapat kendala yang terjadi dalam organisasi yakni kurangnya komunikasi antara ketua pokja II dan pengurus-pengurusnya dalam merealisasikan program.

Dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Solichin, implementasi merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan implementasi yang tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme dan penjabaran keputusan-keputusan melalui prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi. Solichin juga mengatakan, implementasi harus melibatkan banyak organisasi pemerintah. Jika dikaitkan dengan faktor komunikasi dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), proses komunikasi yang dilakukan dalam Pokja II belum melibatkan semua pengurus dan anggota Pokja sehingga implementasi programnya menjadi terhambat karena komunikasi yang dijalin dalam kelompok tidak terjalin dengan baik.

Dalam penyelenggaraan program-program pemberdayaan, diperlukan suatu sistem komunikasi yang dapat menjalin interaksi individu secara baik yakni interaksi antara ketua Pokja II dengan pengurus-pengurusnya serta masyarakat desa. Sistem komunikasi itu adalah komunikasi yang memiliki makna yang mampu mengarahkan pada pencapaian suatu tujuan secara efektif yaitu tercapainya pemberdayaan masyarakat. Eksistensi pemberdayaan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui pemberdayaan ini diharapkan menghantarkan dan memperkuat masyarakat secara aktif dan kreatif dalam mengembangkan diri mereka menuju kehidupan yang sejahtera. Diharapkan juga akan mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan dan keterampilan dalam kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya akan tercipta, membangun dan memelihara perubahan yang berkesinambungan.

Efektivitas komunikasi dalam hubungannya dengan program pemberdayaan masyarakat (PKK) sangatlah penting untuk dapat meningkatkan prestasi kerja dalam pemberdayaan bidang pendidikan dan keterampilan. Tanpa prestasi kerja yang baik dalam program pemberdayaan PKK menjadi sangat sulit bahkan mustahil untuk mencapai keberhasilan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Prestasi kerja seseorang dalam kinerjanya akan ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya faktor peran kepemimpinan dengan cara tertentu untuk melakukan komunikasi secara efektif.

beberapa bentuk komunikasi pada dasarnya adalah sama, yaitu segala tahapan komunikasi mulai dari menciptakan informasi sampai dengan informasi tersebut dapat dipahami oleh komunikan. Berkaitan dengan implementasi program, maka komunikasi merupakan proses pembentukan dimana keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran (dalam Subarsono, 2005: 90).

Berdasarkan hasil temuan peneliti melalui wawancara diperoleh informasi yang menunjukkan bahwa, implementasi program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam bidang pendidikan dan keterampilan di Desa Woloau belum memiliki proses komunikasi yang efektif. Proses komunikasi yang belum efektif antara ketua pokja II dan pengurusnya sehingga jalinan komunikasi menjadi terhambat dalam melaksanakan program-program pada bidang pendidikan dan keterampilan. Oleh karena itu, dalam proses komunikasi terdapat kendala yang terjadi dalam organisasi yakni kurangnya komunikasi antara ketua pokja II dan pengurus-pengurusnya dalam merealisasikan program

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan suatu potensi yang dimiliki berupa materi atau unsur lain dalam kehidupan dimana dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi berupa barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Sumber daya digolongkan dalam dua aspek yakni:

1. Aspek teknis yang memungkinkan bagaimana sumber daya dimanfaatkan
2. Aspek kelembagaan yang menentukan siapa yang mengendalikan sumber daya dan bagaimana teknologi digunakan.

Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja (dalam Subarsono, 2005: 91). Dalam mengelola sumber daya perlu adanya nilai tambah kepada sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil temuan peneliti terkait dengan implementasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam bidang pendidikan dan keterampilan pada indikator sumber daya terdapat belum memahami tugas dan fungsi dalam pelaksanaan program-program kegiatannya. Pengetahuan atau sumber daya yang dimiliki anggota pengurus pokja II dalam bidang pendidikan dan keterampilan sangat minim. Sehingga menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan program tersebut. Pada dasarnya, sumber daya manusia yang baik akan menjamin mutu kerja dan kinerja yang baik pula, sebaliknya mutu sumber daya yang rendah akan mendatangkan kendala dalam pelaksanaan suatu program kegiatan.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi yang dikemukakan oleh Solichin, bahwa implementasi program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam bidang pendidikan dan keterampilan, merupakan fungsi implementasi mencakup pola dalam menjalankan program-program pemberdayaan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi dalam bidang pendidikan dan keterampilan menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Pemahaman pengurus atau pengelola suatu program sangatlah penting dan menentukan pelaksanaan program tersebut. Pemahaman atau sumber daya manusia para pengelola atau pengurus terhadap tugas pokok dan fungsinya harus benar-benar dipahami secara baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya. Karena, sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

## **3. Disposisi**

Disposisi merupakan kecenderungan atau kebiasaan untuk bersikap terhadap suatu perlakuan tertentu atau dalam kondisi tertentu. Disposisi menunjukkan karakteristik seseorang yang ditunjukkan ketika berinteraksi dengan orang lain secara sadar. Kata disposisi (*disposition*) secara terminologi sepadan dengan kata sikap. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif (dalam Subarsono, 2005: 91-92).

Menurut Mahmudi (2010:3), mendefinisikan disposisi sebagai kecenderungan untuk berperilaku secara sadar (*consciously*), teratur (*frequently*), dan sukarela (*voluntary*) yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Perilaku-perilaku tersebut antara lain adalah percaya diri, gigih, ingin tahu, dan berpikir fleksibel.

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa disposisi merupakan sikap atau watak yang dimiliki oleh implementor dalam menunjukkan karakteristik yang menjalankan suatu kebijakan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti terkait dengan implementasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam bidang pendidikan dan keterampilan pada indikator disposisi pada dasarnya ketua pokja II dan pengurusnya belum mampu melaksanakan tugas dan kewajiban serta mengoptimalkan program-program PKK, dan pengurus-pengurus pokja II bekerja sangat tidak efektif sehingga terhambatnya pelaksanaan program yang tidak dapat berjalan dengan baik.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan menurut Solichin dalam pemrakarsa kebijakan atau pembuat kebijakan secara garis besar dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan adalah untuk membentuk tujuan-tujuan yang diwujudkan dalam karakteristik menuju tercapainya tujuan-tujuan yang dikehendaki. Suatu kebijakan akan berhasil dengan baik dalam implementasinya apabila didukung oleh pengurus pelaksanaan, perilaku pengurus pelaksana yang positif dan sesuai dengan prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan, penempatan atau penyusunan berdasarkan prinsip dan motivasi dalam bekerja. Karena disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personal yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan. Pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakannya yang telah ditetapkan.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Birokrasi dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tap*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel (dalam Subarsono, 2005: 92).

Berdasarkan hasil temuan peneliti terkait dengan implementasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam bidang pendidikan dan keterampilan pada indikator struktur birokrasi bahwa selama ini pelaksanaannya tidak berhasil dengan baik sehingga tujuan untuk mensejahterakan masyarakat belum dapat tercapai. Para pengurus Pokja II dan Ketua Pokja II tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Solichin, proses kebijakan implementasi tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan yang dimiliki oleh pejabat pelaksana di lapangan. Birokrasi sebagai lembaga implementasi kebijakan publik, harus mampu mengembangkan sistem dan prosedur birokrasi yang dilakukan secara legal, rasional, efektif dan efisien. Maksudnya dalam melaksanakan kebijakan publik harus ada pembagian tugas, ada struktur dan peraturan formal. Birokrat selaku aparatur pemerintah yang melaksanakan tugasnya secara

efesien adalah aparatur yang mempunyai kemampuan tinggi untuk mengoptimalkan pemanfaatan dalam sumber daya yang tersedia dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Birokrasi yang efektif adalah aparatur yang sungguh-sungguh sadar akan pentingnya pencapaian sasaran yang telah ditentukan baik dari segi waktu dan dananya.

## SIMPULAN

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembangunan akan berhasil dengan efektif apabila di satu pihak ada fasilitas, kemudahan-kemudahan dan sistem pelayanan yang disediakan pemerintah dan di lain pihak ada partisipasi aktif seluruh masyarakat. Berdasarkan hasil temuan peneliti mengenai implementasi program PKK dalam bidang pendidikan dan keterampilan di Desa Woloau, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, maka ada empat kesimpulan penting yang dapat ditarik oleh peneliti.

**Pertama**, implementasi program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam bidang pendidikan dan keterampilan di Desa Woloau belum memiliki proses komunikasi yang efektif. Proses komunikasi yang belum efektif antara ketua pokja II dan pengurusnya sehingga jalinan komunikasi menjadi terhambat dalam melaksanakan program-program dalam bidang pendidikan dan keterampilan.

**Kedua**, implementasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam bidang pendidikan dan keterampilan pada indikator sumber daya terdapat belum memahami tugas dan fungsi dalam pelaksanaan program-program kegiatannya. Pengetahuan atau sumber daya yang dimiliki anggota pengurus pokja II dalam bidang pendidikan dan keterampilan sangat minim.

**Ketiga**, implementasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam bidang pendidikan dan keterampilan pada indikator disposisi pada dasarnya ketua pokja II dan pengurusnya belum mampu melaksanakan tugas dan kewajiban serta mengoptimalkan program-program PKK. Pengurus Pokja II tidak pernah mengadakan pertemuan dalam melakukan kegiatan yang direncanakan sehingga dalam pelaksanaan program tersebut tidak memiliki rasa tanggungjawab.

**Keempat**, implementasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam bidang pendidikan dan keterampilan pada indikator struktur birokrasi bahwa selama ini pelaksanaannya tidak berhasil dengan baik sehingga tujuan untuk mensejahterakan masyarakat belum dapat tercapai. Para pengurus Pokja II dan Ketua Pokja II tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

## SARAN

### 1. Bagi TP PKK Desa Woloau

Disarankan bagi Tim Penggerak PKK Desa Woloau, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende dapat meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan penyuluhan terhadap pengurus dan anggota organisasi PKK di Desa Woloau, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende terhadap pentingnya keterlibatan dalam pembangunan pemberdayaan perempuan khususnya pengurus dan anggota organisasi PKK yang yang berdampak pada bidang pendidikan dan keterampilan.

### 2. Bagi Organisasi PKK Pokja II

Disarankan bagi pengurus dan anggota organisasi PKK khususnya pada kelompok kerja II Desa Woloau, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende agar kebijakan dapat diselenggarakan dengan pelaksanaannya. Dalam memprioritaskan kebutuhan masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan dan anak-anak di Desa Woloau. Proses penyelenggaraan program-program yang sudah direncanakan harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab. Peneliti memberikan empat (4) rekomendasi bagi pengurus dan anggota PKK Pokja II dalam bidang pendidikan dan keterampilan sebagai berikut:

- a. Komunikasi, pengurus dan anggota pokja II harus mampu menjalin komunikasi dengan semua pihak dan lebih terbuka dalam menjalankan komunikasi agar tercapainya tujuan yang sudah direncanakan.
- b. Sumberdaya, menyelenggarakan pertemuan, melakukan penyuluhan untuk menambah wawasan ketua Pokja II dan para pengurusnya.
- c. Disposisi, ketua pokja II dan pengurusnya harus lebih bertanggungjawab atas tupoksi sehingga mampu merealisasikan program yang telah disusun.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. 2010. Panduan Pedoman Tim Penggerak PKK Tingkat Desa
- Edward III, George C. 1984. Public policy implementing. London : Pressinc
- Solichin, Wahab Abdul. 1997. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi aksara
- Sumodiningrat, dkk. 2016. Membangun Indonesia Dari Desa. Yogyakarta:Media Pressindo
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono.2008. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.